

DINAMIKA PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1950-1974

Oleh: Erwinda Faridatus Sholikhah, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Erwindafs@gmail.com

ABSTRAK

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, begitupula masyarakat D.I Yogyakarta. Tingginya minat penduduk muslim di D.I Yogyakarta untuk melaksanakan ibadah haji yang menjadi dasar peneliti untuk mengkaji penyelenggaraan urusan ibadah haji di D.I Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh mengenai adanya perubahan penyelenggaraan urusan haji disetiap periode dan bagaimana pengaruh mereka yang melaksanakan ibadah terhadap lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji di D.I Yogyakarta dari tahun 1950-1974 terkadang mengalami peningkatan dan penurunan jumlah jama'ah haji. Peningkatan dan penurunan ini dipengaruhi oleh Ongkos Naik Haji dan kotum (kuota umum). Selain itu, pelaksanaan ibadah haji juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar faktor keagamaan seperti; keadaan ekonomi, politik, perkembangan transportasi, dan sebagainya. Adanya minat masyarakat muslim D.I Yogyakarta untuk melaksanakan ibadah haji merupakan hal yang menarik perhatian. Pandangan masyarakat tentang orang yang telah ibadah haji akan mendapatkan gelar atau predikat yang lebih tinggi dalam strata sosial di masyarakat pada umumnya, dan mereka menganggap orang yang telah pergi haji memiliki pengetahuan lebih mengenai keagamaan. Orang yang berhaji dianggap orang yang shaleh dalam segi keagamaan dan memiliki pengetahuan yang lebih tentang keagamaan. Selain itu, orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji juga berperan cukup penting dalam kegiatan masyarakat seperti mengisi kajian di masjid, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Dinamika, D.I Yogyakarta, Penyelenggaraan Urusan Haji*

THE DYNAMICS OF ORGANIZING HAJJ IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN 1950-1974

ABSTRACT

The majority of the Indonesian citizen are Muslim, so as the people of the Special Region of Yogyakarta (D.I. Yogyakarta). High interest of Muslim society in D.I Yogyakarta to perform hajj become the reason of the researcher in studying the Hajj management in D.I Yogyakarta. The present research aimed at studying further on the changes of hajj management in every period and how the people who had completed their hajj affected the environment. The result of the study showed that Hajj in D.I Yogyakarta from 1950-1974 sometimes experienced increase and decrease concerning the number of pilgrims. This increase and decrease were affected by the Hajj Cost and General quota. Also, Hajj was also affected by factors outside the religion namely economy condition, political condition, transportation growth, and so forth. The interest of Muslim society in D.I Yogyakarta in performing Hajj is an exciting phenomenon. The Society viewed people who have done their Hajj will obtain a higher title or predicate in the social strata of the society. The society considered the people who have performed hajj as possessing more religious knowledge. People who perform Hajj are considered as a religious individual and hold more religious knowledge. In addition, people who have performed hajj also take essential roles in society. Moreover, people who have performed hajj also play an important role on society's life, such as giving religious lecture, teaching religious knowledge to the children, etc.

Keywords: Dynamics, D.I Yogyakarta, Hajj Management

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.¹ Ada berbagai macam teori tentang masuknya agama Islam di Nusantara. Salah satu dari teori tersebut adalah Teori Arab. Crawford mengatakan bahwa agama Islam di Nusantara dikenalakan langsung dari Arab. Sebagian para ahli Indonesia sepakat dengan teori ini. Mereka berpendapat bahwa pada tahun 674 M telah terdapat perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatra dan telah terjadi hubungan Indonesia-Arab jauh sebelum abad ke 13.²

Pengaruh dari orang-orang Arab yang tinggal di Nusantara relatif besar, bahkan pengaruhnya dapat dilihat dari berbagai segi. Salah satunya dari segi pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan haji³ merupakan rukun Islam yang ke lima. Orang Islam yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji adalah orang yang telah memenuhi syarat, diantaranya: 1. Orang Islam, 2. *Mukallaf* (akal sehat), 3. *Baligh* (dewasa), 4. Merdeka bukan budak belian (statusnya merdeka tidak dimiliki orang lain), dan 5. Memiliki kesanggupan.⁴

Perjalanan haji dari Nusantara menuju tanah suci (Makkah) telah dilakukan sejak awal Islam bersentuhan dengan masyarakat di Nusantara. Akan tetapi, tidak diperoleh bukti konkret tahun berapa dan siapa orang pertama yang pergi berhaji. Namun hal demikian dapat ditelusuri dengan cerita rakyat (*oral traditional*) tentang perjalanan haji yang dikaitkan dengan para Wali Songo ke tanah

suci.⁵ Pada pertengahan abad ke-17 raja-raja Jawa mencari legitimasi politik di Makkah. Tahun 1630-an, Raja Banten dan Raja Mataram saling bersaing mengirim utusan ke Makkah untuk mencari pengakuan dari sana dan meminta gelar "Sultan". Gelar tersebut dipercaya memberi sokongan spiritual terhadap kekuasaan mereka. Sebetulnya di Makkah tidak ada instansi yang memberi gelar kepada penguasa lain. Para Raja Jawa ini menganggap bahwa penguasa Haramayn (Makkah dan Madinah) memiliki spiritual seluruh *Dar al-Islam*.⁶

Pada masa Pemerintah Kolonial, Pemerintah turut serta dalam urusan ibadah haji. Menurut data statistik Pemerintah Hindia Belanda, jumlah jama'ah haji setiap pulang ke Nusantara lebih sedikit daripada yang berangkat. Selisih antara yang berangkat dan pulang tidak tercatat secara resmi oleh Pemerintah Kolonial Belanda, hal tersebut menyulitkan Pemerintah kolonial untuk mengawasi para jama'ah. Kenyataan tersebut membuat ketakutan Pemerintah kolonial dan pada waktu itu lahir pula paham *Pan Islamisme*.⁷ Berawal dari sinilah Pemerintah kolonial ikut campur dalam pelaksanaan pemberangkatan haji. Adapaun masa selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang tidak diperoleh catatan tentang perjalanan haji. Sampai pada masa setelah kemerdekaan umat muslim kembali ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai pada tahun 1950, Pemerintah menyelenggaraan haji di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia dan

¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2011.

² Mundzirin Yusuf, dkk (ed), *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pinus, 2006), hlm. 40.

³ Pengertian haji menurut bahasa adalah berniat kepada sesuatu yang dimuliakan. Pengertian haji secara istilah adalah pekerjaan yang khusus dikerjakan pada waktu dan tempat tertentu untuk tujuan tertentu. Lihat Projodikoro, *Pengalaman dan Pengamalan Ibadah Haji*, (Yogyakarta: tp, 1978), hlm.1.

⁴ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 83.

⁵ Muhammad Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), hlm. 2.

⁶ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Terj: farid Wajidi dan Rika Iffati, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), hlm, 4-5.

⁷ Pan Islamisme adalah solidaritas seluruh umat Islam, merupakan faham politik keagamaan yang dikembangkan oleh para pemimpin muslim pada perempat abad ke-19 masa kerajaan Turki usmani, mengenai reaksi kehadiran bangsa barat dan tumbuhnya nasionalisme. Lihat juga Martin van Bruinessen, *Ibid.*, hlm. 5.

berlaku di seluruh Indonesia, termasuk di D.I Yogyakarta.

D.I Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang menerapkan sistem tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya pada tahun tersebut antara tahun 1949-1950-an di D.I Yogyakarta mengalami penurunan jumlah jama'ah haji dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun ini kondisi D.I Yogyakarta sedang terjadi konflik⁸ sehingga mempengaruhi pada jumlah jama'ah haji di D.I Yogyakarta. Pada tahun 1950-1974 terjadi penurunan dan peningkatan jama'ah haji di D.I Yogyakarta. Peningkatan dan penurunan tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat dan juga kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis atau suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap pokok yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Heuristik merupakan proses mengumpulkan atau menemukan sumber yang sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Tahap kedua yaitu verifikasi atau kritik sumber, yaitu upaya untuk mendapatkan otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (kebenaran sumber).⁹ Tahap ketiga yaitu

interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber sejarah. Interpretasi digunakan untuk mencari hal-hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian fakta yang logis dan bermakna. Tahap keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL PENELITIAN

A. KEADAAN UMUM KOTAMADYA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang kecil setelah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi D.I Yogyakarta terletak di tengah Pulau Jawa dan termasuk zona tengah bagian selatan dari formasi geologi Pulau Jawa. Letak geografis D. I Yogyakarta terletak antara 7 °. 33'-8 °.12' lintang selatan dan 110 °.00'-110 °.50'. Luas wilayah D.I Yogyakarta pada tahun 2008 yaitu 3.185.80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.890.754 km²). Pembagian luas wilayah D.I Yogyakarta antara lain sebagai berikut; 1. Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km² (18,40%), 2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%), 3. Kabupaten Gunung Kidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%), 4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%), 5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%)

Kedudukan Kota Yogyakarta dari awal kemerdekaan hingga sekarang ini tetap menjadi ibu kota Provinsi D.I Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang Sultan sekaligus menjabat sebagai Gubernur, dan sekarang Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono X. Kota Yogyakarta sendiri dipimpin oleh seorang Wali Kota.¹⁰ Penduduk Yogyakarta mempunyai beragam etnis dan didominasi oleh etnis Jawa,¹¹ di samping itu pula ada suku-suku lain yang hampir meliputi semua suku bangsa

⁸ Pada periode tersebut dimulai dengan pendudukan Belanda atas ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta sampai penarikan pasukan Belanda dari Yogyakarta. telah terjadi peristiwa besar, yang berupa perlawanan TNI beserta seluruh rakyat Indonesia melawan Belanda. satu diantara beberapa peristiwa besar tersebut adalah Serangan Umum 1 Maret 1949. Atim Supomo, Djumarwan, dkk, *Brimob: Dulu, Kini, dan Esok*, (Yogyakarta: Korps Brimob Polri, 2015), hlm.111.

⁹Suhartono W Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 35.

¹⁰ Djoko Suryo, *Kota Lama Kota Baru (Sejarah Kota-Kota Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 32.

¹¹ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 6.

di Indonesia.¹² Keanekaragaman suku yang ada di wilayah ini menjadikan D.I Yogyakarta mendapat julukan Indonesia mini, yang dikaitkan dengan julukan Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar sehingga kota ini menjadi tujuan untuk menuntut ilmu dari berbagai bangsa. Pertumbuhan penduduk D.I Yogyakarta cukup tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi juga disebabkan oleh mobilitas masyarakat dari luar daerah D.I Yogyakarta yang tinggi bila dibandingkan mobilitas dari D.I Yogyakarta keluar.¹³

Wilayah D.I Yogyakarta yang cukup luas dan beriklim tropis sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah D.I Yogyakarta. Sebagian besar masyarakat D.I Yogyakarta yang tinggal dipedesaan adalah masyarakat agraris yang merupakan petani yang hidup dari hasil pertanian dengan cara bersawah dan berladang dengan membuka lahan yang baru. Kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan di D.I Yogyakarta pada umumnya ditopang oleh kegiatan anyam-anyam dan perdagangan kecil yaitu menjual hasil pertanian ke pasar tradisional.¹⁴ Sebagian besar penduduk Kota Yogyakarta bermata pencaharian di sektor industri dan jasa.¹⁵ Warga kota Yogyakarta

lebih memilih berwirausaha sebagai pengrajin cinderamata, batik, tenun, dan sebagian menjadi pegawai negeri.¹⁶ Pada awal abad ke-20, Kota Yogyakarta semakin dinamis dengan munculnya berbagai usaha dibidang perbankan, perkreditan, perkumpulan dagang, perusahaan listrik, pengrajin kayu dan industri. Maraknya dunia usaha di Kota Yogyakarta didukung dengan wilayahnya yang strategis, sarana transportasi yang baik serta tersedianya sumber daya manusia yang memadai.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masyarakat D.I Yogyakarta yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, tidak menghambat niatan mereka untuk melaksanakan ibadah haji, meskipun penghasilan utama mereka hanya mengandalkan dari hasil panen tetapi mereka selalu menyetor sebagian penghasilan untuk ditabung ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai sarana penyimpanan bagi mereka calon ibadah haji. Meskipun menurut keterangan dari beberapa narasumber menjelaskan bahwasanya masih banyak masyarakat yang “terlalu memaksakan” pelaksanaan ibadah haji. Memaksakan disini adalah dalam hal perekonomian, banyak diantara mereka yang merelakan menjual beberapa aset berharga mereka berupa emas dan tanah untuk menunaikan pelaksanaan ibadah haji.

Masyarakat di D.I Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Setiap aliran agama di D.I Yogyakarta bebas dan berhak untuk mengembangkan ajaran yang dipercayainya. Di D.I Yogyakarta terdapat berbagai macam keagamaan, yaitu agama Islam, Kristen, baik Khatolik maupun Protestan, Konghu Chu, Hindu dan Buddha. Pada perkembangannya kondisi keagamaan di D.I Yogyakarta pada tahun 1970-an berdasarkan data mengenai pemeluk agama dari kantor wilayah berdasarkan laporan dari Kantor Departemen

¹² Bening Tri Hanggoro, “Sejarah Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta 1960-1980”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011), hlm. 35.

¹³ M. Alwi Dahlan, *Penduduk Indonesia Selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I: Daerah Istimewah Yogyakarta*, (Jakarta: Indonesia, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1992), hlm. 75-79.

¹⁴ *Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku I Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 653*. Berisi Laporan tentang Keadaan Desa-desa dari Kabupaten Sleman Tahun 1957, Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2002.

¹⁵ Srie Sadaah Supono, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Tatakrama Daerah: Studi Kasus Pada Komuniti Perkotaan di Yogyakarta*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm.15.

¹⁶ Sagimun Mulus Dumadi, *Sistem Kesatuan Hidup setempat Daerah Istimewah Yogyakarta*, (Yogyakarta: Depdikbud, 1980), hlm. 32.

¹⁷ Djoko Soekirman dkk, *Sejarah Kota Yogyakarta*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986), hlm. 79.

Agama Kabupaten dan kotamadya. Data pemeluk agama Islam di D.I.Yogyakarta menempati peringkat teratas, yaitu sebanyak 2.501.123. Pemeluk agama Islam mendominasi di antara kabupaten-kabupaten yang ada di D.I Yogyakarta.¹⁸

Tabel I
Jumlah Pemeluk Agama di D. I
Yogyakarta

Agama	Jumlah
Islam	2.501.123
Kristen/Protestan	31,191
Katholik	83.554
Hindu dan Budha	4.840
Konghu Chu	1.308

Sumber: Tim Departemen Agama D.I. Yogyakarta 1976, (Jakarta: *Departemen Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama*, 1976).

Banyaknya pemeluk agama Islam di D.I Yogyakarta menjadi faktor utama masyarakat untuk menjalankan ibadah haji. Keutamaan ibadah haji adalah mengharapkan pahala, rahmat, dan kesempurnaan dalam rukun Islam kelima. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya, yaitu memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut.

B. PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI DI INDONESIA TAHUN 1950-1974

Pelaksanaan ibadah haji oleh penduduk Nusantara (Indonesia) telah dimulai sebelum kedatangan bangsa kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial orang-orang muslim yang telah melaksakan ibadah haji biasanya memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat. Hal ini mendasari pemerintah kolonial membatasi umat muslim untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Kenyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pemerintah kolonial. Di sisi lain lahirnya gerakan *Pan Islamisme* dikhawatirkan oleh

pemerintah kolonial akan sampai ke Indonesia melalui jama'ah haji Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan-peraturan agar calon jama'ah haji Indonesia dapat melaksanakan perjalanan ibadah haji dengan rasa aman dan nyaman. Tetapi dibalik pemberangkatan ibadah haji pemerintah kolonial ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan itu dihasilkan dari uang para jama'ah haji yang berangkat menggunakan kapal milik pemerintah kolonial.¹⁹

Pada saat akhir masa revolusi fisik, Pemerintah RI merasa perlu mengirim utusan diplomatik ke negara-negara Arab dan negara Islam lainnya dengan maksud untuk memperkenalkan perjuangan rakyat Indonesia demi kemerdekaan dan memperoleh dukungan dan bantuan dari negara-negara sesama muslim. Utusan itu dikirim ke Mekkah selama musim haji, agar dapat menghubungi sebanyak mungkin pemimpin negara pada saat yang sama. Misi haji pertama dimulai pada tahun 1948. Misi haji ini memanfaatkan musim haji untuk berjumpa dengan para pemimpin dunia yang sedang berkunjung ke Mekkah. Misi haji kedua dikirim tahun 1949 yang bertujuan untuk menjelaskan rantai-rantai dan tahap-tahap perjuangan RI. Selain itu, untuk menjalin hubungan dengan Bangsa Arab dan negara-negara lain maupun negara Islam.²⁰ Secara politis misi haji ini dilakukan untuk menggugah simpati negara-negara Islam sehingga baik secara *de facto* maupun *de jure* mengakui kedaulatan RI, dalam kesempatan itu misi haji melalui pers Arab memberitakan perjuangan Bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda.²¹ Hal ini menjadi kebanggaan masyarakat karena telah berhasil merebut kemerdekaan Indonesia.²² Sejak diakuinya kedaulatan Indonesia penyelenggaraan urusan haji ditangani oleh kementerian agama. Pada tanggal 30 Desember

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

²⁰ Henri Chambert-Loir, *Naik Haji di Masa Silam Tahun 1900-1930*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 737-739.

²¹ Surat kabar *Nasional*, 1 Juli 1953.

²² Henri Chambert-Loir, *op.cit.*, hlm. 752.

¹⁸ Peta Departemen Agama D.I. Yogyakarta 1976, (Jakarta: Departemen Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1976), hlm. 5.

1949 terbentuklah bagian urusan haji, yaitu setelah terbentuknya kabinet RIS dengan Menteri Agama K.H Wahid Hasyim. Beberapa program politik dari Kementerian Agama RIS diantaranya adalah mengubah politik keagamaan sistem pemerintah Belanda dengan politik keagamaan Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila.²³

Pada tahun 1950 penyelenggaraan urusan haji di bawah naungan pemerintah Indonesia. Pada tanggal 21 Januari 1950 terbentuk yayasan dengan nama Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI). PPHI tersebut diketuai oleh KHM Sudjak dan diwakili oleh KH Wahab Hasbullah. Panitia Perbaikan Perjalanan Haji merupakan bentuk baru dari Commite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia pada zaman Kolonial Belanda.²⁴ Pada tahun 1964 PPHI diganti dengan Dewan Urusan Haji. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 1964 tentang penyelenggaraan haji secara interdepartemental, sejak saat itu urusan haji menjadi tugas nasional yang tidak cukup dikerjakan oleh satu departemen saja, melainkan perlu melibatkan unsur-unsur dari departemen-departemen pemerintah serta organisasi masyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan penyelenggaraan haji.²⁵

a. Transportasi Haji

Pada tahun 1950 sebuah bank, Bank Haji Indonesia dan didirikan sebuah perusahaan kapal yang bernama Pelayaran Muslimin Indonesia (MUSI), tetapi perusahaan Musi tetap tidak mempunyai kapal sendiri dan men-charter kapal dari perusahaan lain.²⁶ Baru pada tahun 1964 dengan diterbitkannya Keputusan

Presiden nomor 122 tahun 1964 tentang upaya mengatasi pengangkutan jama'ah haji (laut) dari Indonesia Pada 1 Desember 1964 berdirilah PT. Arafat yang bergerak di bidang pelayanan ibadah haji dengan kapal laut. Pengangkutan dengan menggunakan pesawat terbang terealisasi pada tahun 1952.²⁷

b. Jama'ah haji

Pemberangkatan jama'ah haji setelah kemerdekaan dilakukan pertama kali pada tahun 1946. Penyelenggaraan haji pada waktu itu masih ditangani oleh Pemerintah Belanda karena pada saat itu perairan Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Bagi calon jama'ah haji yang berminat menunaikan haji tinggal datang ke pelabuhan embarkasi yang selama ini digunakan Belanda untuk pemberangkatan haji. Pada masa kepemimpinan Soekarno tahun 1950/1951 merupakan tahun kedua penyelenggaraan haji. Pada tahun ini, karena ada inflasi yang tinggi serta kebijakan *sanering*. Disisi lain, karena ketika Indonesia memutuskan kembali ke NKRI, kondisi ekonomi dan politik masih belum stabil. Sampai pada tahun 1951/1952 Indonesia mengalami inflasi, pemerintah memberangkatkan umat muslim untuk berangkat haji ke Makkah ± 9.502 jama'ah. Ekonomi Indonesia semakin membaik pada tahun 1952/1953. Indonesia mengalami devaluasi hingga mampu memberangkatkan 14.031 jama'ah haji. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar selama tahun 1949-1962 rata-rata 10.000 hingga 12.000 jama'ah haji.²⁸

Selain itu pada periode tahun 1960, pemerintah menerapkan sistem kuota yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1960²⁹ dengan menentukan jumlah

²³ H. Mursidi dan H. Sumuran Harahap, *op.cit.*, hlm.27.

²⁴ H. Mursyidi dan H. Sumuran Harahap, *Lintas Sejarah Perjalanan Haji Indonesia*, (Jakarta: MARS, 1948), hlm. 34.

²⁵ Tulus, *Membangun Citra Departemen Agama: melalui Penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta: Mediacita, 2005), hlm. 20.

²⁶ Deliar Noer, *Administrasi Islam Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 105.

²⁷ *Pelita*, 26 April 1994. Dalam *skripsi* Kurnia Tsalitsatin Robbaniyah, "Haji Embarkasih Surabaya: dari Kolonial ke Republik (1922-1978)", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2007), hlm. 24.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁹ Ketidakseimbangan antara minat haji dan terbatasnya fasilitas, maka Menteri Agama memberlakukan sistem *Quotum*, yaitu jumlah jatah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari masing-masing daerah dengan pertimbangan skala prioritas. Lihat bukunya Douwes dan Niko

maksimum jama'ah haji yang dapat menaikan haji di Makkah. Sistem kuota tersebut diterapkan berdasarkan dua pertimbangan yaitu: 1. Untuk memenuhi keinginan kaum muslimin yang ingin menunaikan ibadah haji agar mereka diberi subsidi. 2. Karena akhir-akhir ini (1950an - 1960an) jumlahnya jama'ah haji mengalami peningkatan. Banyak sedikit atau naik-turunnya ONH sangat mempengaruhi jumlah jama'ah haji melalui ONH.³⁰

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia, No. 6 tahun 1969 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan urusan haji. Penyelenggaraan urusan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi keseluruhan kegiatan seperti: menentukan jumlah kuota haji, pembagian kuota haji, menentukan ONH penerimaan dan pendaftaran jama'ah haji, pengangkutan jama'ah haji, pemeliharaan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan selama dalam perjalanan melaksanakan haji, sejak persiapan keberangkatan hingga pemulangan.³¹ Tujuan pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut untuk melindungi calon jama'ah haji. Pemerintah melindungi calon jama'ah haji agar tidak terlantar karena ditipu oleh orang-orang atau organisasi penyelenggara perjalanan haji yang tidak bertanggung jawab. Selama masa Orde Baru, haji diselenggarakan oleh Dirjen Urusan Haji. Jumlah jama'ah haji yang diberangkatkan dari tahun 1967-1978 senantiasa meningkat. Pada tahun 1966/1967 sampai 1968/1969 berkisar antara 15.983 sampai 16.806. tetapi pada tahun 1969/1970 jumlah jama'ah haji mengalami kemerosotan menjadi 9.292 jama'ah. Hal tersebut dikarenakan dikeluarkannya Intruksi Presiden tahun 1969 hanya pemerintah yang boleh memberangkatkan haji. Pada tahun berikutnya

jama'ah haji Indonesia mengalami peningkatan jika dibandingkan pada masa Orde Lama.

Sejak musim haji tahun 1969/1970 sistem kuota dihapuskan. Perubahan sistem tersebut, *pertama*, merupakan buah hasil dari membaiknya kehidupan ekonomi di Indonesia. *Kedua*, semakin meningkatnya sarana angkutan terutama fasilitas angkutan udara, baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia. *Ketiga*, ketentuan waktu untuk tinggal di Makkah dipersingkat menjadi 35 hari, yang berarti mengurangi beban ongkos hidup selama di Saudi Arabia. Pada saat perekonomian Indonesia mulai membaik dan devisa negara meningkat serta jangka waktu tinggal di Makkah dipersingkat juga dapat mengurangi kebutuhan devisa bagi tiap-tiap jama'ah haji. Semua perkembangan itu mengakibatkan jumlah jama'ah haji Indonesia meningkat dengan cepat. Sejak saat itu subsidi kepada jama'ah haji dihapuskan. Walaupun demikian, dengan perkembangan kemakmuran ekonomi dan dihapuskannya sistem kuota, jumlah jama'ah haji terus meningkat. Lonjakan jumlah jama'ah haji yang luar biasa tahun 1974/1975 yang hampir mencapai 70 ribu orang.³²

C. PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1950-1974

Berdirinya Kantor Agama provinsi D.I Yogyakarta tidak terlepas dari perkembangan struktur Kementerian Agama RI. Terbentuknya Kementerian Agama D.I Yogyakarta sudah ada sejak instruksi presiden tahun 1946 mengenai terbentuknya kantor agama Provinsi, namun dalam tahap awal struktur organisasi Kementerian Agama hanya ada di tingkat pusat. Baru pada tahun 1950 terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950 tentang susunan organisasi secara resmi. Pada masa ini mulailah dibentuk struktur secara resmi di tingkat pusat dan provinsi. Kementerian Agama D.I Yogyakarta pada awalnya diketuai oleh Prof. K.H Farid Ma'ruf mulai tanggal 1 Januari 1951 sampai 20 Juni 1965, Farid Ma'ruf dipercaya menjabat sebagai Kepala Djawatan Agama di Daerah Istimewa D.I Yogyakarta.³³

Captain, *Indonesia dan Haji*, (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 104.

³⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Dampak Ekonomi Ibadah Haji di Indonesia*, Prisma edisi April vol. XII, hlm. 54.

³¹ ANRI, Ekuin (Ekonomi Keuangan dan Industri) No. 275, Berisi Tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1969.

³² Zamakhsyari Dhofier, *loc.cit.*

³³ *Ibid.*, hlm. 43.

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1971 dikeluarkan keputusan Menteri Agama No. 53 tahun 1971 tentang struktur organisasi, tugas, wewenang dan tata kerja instansi Departemen Agama Daerah. Jika sebelumnya kepala Djawatan Urusan Agama ditunjuk sebagai koordinator pimpinan Perwakilan Departemen Agama, maka sejak tahun 1973 istilah tersebut diganti dengan Kepala Perwakilan sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen Agama Propinsi.³⁴

a. Tata Cara Mendaftar Haji

Pendaftaran haji umumnya dilakukan oleh koordinator urusan haji daerah tingkat I. Langkah-langkah mendaftarkan diri sebagai pelamar calon jama'ah haji, yaitu harus memiliki surat keterangan akan berangkat haji. Surat tersebut diberikan oleh calon jama'ah haji yang diperoleh dari kepala desa/daerah dengan melampirkan 2 pas foto.³⁵ Para calon jama'ah haji harus menunjukkan Kartu Pembagian Kotum Haji (KPKH) kepada Panitia Peneliti Pendaftaran Haji (P3H) untuk ditukar dengan Surat Izin Pergi Haji (SIPH).³⁶ Sebelum melakukan penyetoran ONH, calon jama'ah haji terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter.³⁷ Mengenai pemeriksaan kesehatan itu berdasarkan internasional *Sanitary Regulation* atas perantara Pemerintah Arab Saudi, bahwa semua jama'ah haji harus mendapat 2 kali suntikan kolera dan jarak waktu paling lama 7 hari antara suntikan pertama dan suntikan kedua.

Pada saat mendaftar, calon haji akan dibuatkan surat perihal pendaftaran haji untuk penyetoran ONH ke bank yang akan dituju. Pembayaran haji ini hanya bisa disetorkan di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Bank tersebut antara lain bank BRI, BNI, Bank Daerah D.I Yogyakarta, dan Bank Dagang Negara (BDN). Selepas melakukan penyetoran dan mendapatkan bukti penyetoran sebanyak 4 rangkap, yaitu untuk calon haji, untuk diserahkan ke Kantor Departemen Agama, untuk pembuatan visa (jika sudah lunas membayar ONH), dan untuk diarsipkan ke Jakarta.³⁸

Pembayaran setoran ONH dengan membawa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun kartu keluarga dan pas foto ukuran 3x4. Seusai mendapatkan bukti penyetoran calon pendaftar haji tersebut menyerahkan bukti setorannya ke Departemen Agama masing-masing daerah.³⁹ Panitia pendaftaran daerah tingkat II membuat dan mengirimkan laporan daftar jumlah pelamar calon haji kepada panitia pendaftaran daerah tingkat I. Panitia pendaftaran daerah tingkat I kemudian mengirimkan salinan dan daftar jumlah pelamar calon haji kepada Departemen Agama, Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Dewan Urusan Haji dan juga pengurus yang berada di embarkasi.⁴⁰

b. Penyelenggaraan Urusan Haji di D.I Yogyakarta Pada Masa Orde Lama

Pada tahun 1950-1951 haji di D.I Yogyakarta masih tergolong sedikit. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi, dan politik di Indonesia khususnya di D.I Yogyakarta masih belum stabil. Pada tahun 1950 terdapat 35 pendaftar haji dan 35 yang mendapatkan kuota untuk pemberangkatan ibadah haji di D.I Yogyakarta. Pasca dibukanya pelabuhan Semarang sebagai pelabuhan untuk pemberangkatan haji pada tahun 1950, maka pemberangkatan haji D.I Yogyakarta ikut dalam embarkasi Semarang.⁴¹ Pembagian

³⁴ Tim Penyusun, *Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY, 2014), hlm. 20-22.

³⁵ *Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 2705*. Berisi Laporan Penjelenggaraan Urusan Hadji Daerah Istimewah Jogjakarta Tahun 1970-1971, Yogyakarta: BPAD DIY.

³⁶ H. Achmad Irfandi, Wawancara di Yogyakarta, 11 Juli 2018.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ H. Dardiri, Wawancara di Yogyakarta, 30 Agustus 2018.

⁴⁰ *Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 2705, loc.cit.*

⁴¹ Pada tahun 1922 sampai tahun 1949 embarkasi Surabaya mencakup wilayah; Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta, Surakarta, Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, Nusa Tenggara dan Papua. Setelah urusan haji diambil alih oleh pemerintah RI pada tahun 1950, maka wilayah Jawa Tengah,

kuota ibadah haji tergantung pada jumlah persebaran penduduk muslim dan juga pendaftaran haji. Pemerintah menetapkan ONH untuk pemberangkatan haji tahun 1950 yang berjumlah Rp. 3.395.14, sehingga mengalami kenaikan 52,3% ONH. Kenaikan ONH ini disebabkan pada masa pemerintahan masa kabinet Hatta untuk mengeluarkan kebijakan “*sanering*” atau pemotongan nilai mata uang dengan ketentuan; uang kertas senilai Rp. 5,00 ke atas bernilai separuhnya. Hal ini berpengaruh pada penentuan ONH haji tahun 1950-1951.⁴²

Pada tahun 1951 terdapat 105 umat muslim yang mendaftarkan haji dari D.I Yogyakarta, tetapi tidak mendapatkan jatah kuota dan tidak diberangkatkan. Hal ini disebabkan adanya berita-berita yang diterima dari PBB dan badan yang bersangkutan WHO (World Health Organisation) menyatakan bahwasannya di Saudi Arabia telah timbul penyakit pes telah memakan korban sebanyak 100 orang. Pemberitaan ini sangat menggelisahkan para jama'ah haji di D.I Yogyakarta yang sedang menunggu pengangkutan ke Mekkah. Indonesia sendiri telah terlanjur memberangkatkan ± 1000 jama'ah haji dengan kapal Kota Baru.⁴³

Menurut keterangan Nasichun, Komisarisi PHI Jawa Tengah di Semarang dalam percakapan pers mengatakan bahwasannya pada tahun 1951 pemberangkatan jama'ah haji melalui jalur laut belum bisa dilaksanakan. Selain adanya wabah penyakit pes dan kolera di Saudi Arabia, kurangnya kapal untuk mengangkut jama'ah haji juga menjadi persoalan.⁴⁴ Kapal mengalami kerusakan dan masih dalam tahap reparasi dipastikan tidak bisa untuk pengangkutan ibadah haji. Maka

Yogyakarta, dan Surakarta tidak lagi masuk dalam wilayah embarkasi Surabaya dengan dibukanya Semarang sebagai pelabuhan haji. Lihat Kurnia Tsalitsatin, “Haji Embarkasih Surabaya: dari Kolonial ke Republik (1922-1978), *Skripsi*, (Surabaya, Universitas Airlangga), hlm. 21.

⁴² Ginanjar Kartasasmita, *op.cit.*, hlm. 32.

⁴³ Surat Kabar *Pedoman*, 31 Djuli 1951.

⁴⁴ Surat Kabar *Pedoman*, 6 Agustus 1951.

dari itu pengumuman yang dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 1951, yaitu mengenai pemerintah R.I telah mengambil keputusan untuk menunda berangkatnya calon jama'ah haji Indonesia. Instruksi penundaan itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Sukiman, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Dasar pengambilan keputusan tersebut ialah berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kedutaan Indonesia yang berada di Jeddah dan Kairo.⁴⁵ Pemerintah pun kemudian memberikan jaminan kepada calon jama'ah haji yang tidak jadi berangkat. Jaminan itu diantaranya ialah, menjamin mereka untuk naik haji pada kesempatan tahun depan, memberi keringanan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing, pemerintah bersama PHI akan memberi jaminan sekedarnya selama mereka menunggu kesempatan pulang.⁴⁶

Pada tahun 1952-1958 terdapat peningkatan pendaftaran calon jama'ah haji di D.I Yogyakarta. Peningkatan pendaftaran calon haji ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk D.I Yogyakarta. Disamping itu, pada tahun-tahun tersebut produksi perekonomian di D.I Yogyakarta sudah mulai stabil. Hal inilah yang menjadikan keinginan umat Islam menjadi lebih besar untuk menyempurnakan imannya dengan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, kondisi perekonomian di D.I Yogyakarta yang sebagian besar adalah petani, tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berhaji kebanyakan berprofesi sebagai petani, pedagang maupun pengusaha, adapun pegawai negeri tetapi sedikit. Sedikitnya para pegawai negeri yang ingin melaksanakan haji dikarenakan harus mendapat izin cuti yang cukup panjang. Di sisi lain, gaji untuk pegawai negeri saat itu terbilang masih kecil dibandingkan dengan saat ini.

Pemerintah juga telah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas publik di D.I Yogyakarta. Pemerintah telah melakukan perbaikan dalam bidang transportasi seperti kereta api dan bus. Kereta api dan bus ini juga berperan dalam hal pemberangkatan haji. Para calon jama'ah haji

⁴⁵ Surat Kabar *Pedoman*, 16 Agustus 1951.

⁴⁶ *Ibid.*

akan menaiki kereta api ataupun bus terlebih dahulu menuju embarkasi pemberangkatan haji. Di sisi lain, pada tahun 1952 terbentuk yayasan PDHI (Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia) yang terletak di Jalan Pekapalan Alun-Alun Utara, D.I Yogyakarta. Berdirinya PDHI ini tidak terlepas dari usaha sebagian jama'ah haji D.I Yogyakarta pada musim haji tahun 1371 H/1952 M. Awalnya yayasan ini berdiri dari inisiatif para jama'ah haji yang telah melakukan ibadah haji di Mekkah.⁴⁷ Selepas mengetahui keadaan jama'ah haji yang berada di kota pelabuhan, di kapal dan di Madina, maka jama'ah haji dari D.I Yogyakarta memandang perlu adanya suatu badan yang bertujuan untuk membimbing para calon haji supaya menjadi haji yang mabrur.⁴⁸ Yayasan PDHI ini berdiri sendiri tanpa ada ikatan dengan lembaga-lembagai lain. Tujuan berdirinya PDHI, yakni:

1. Memelihara Ukhuwah Islamiyah secara luas.
2. Ikhtiyar mencapai haji mabrur.
3. Menggerakkan tholabul ilmi dana mal.

Yayasan PDHI ini berdiri sendiri tanpa ada ikatan dengan lembaga-lembagai lain. PDHI juga mengadakan bimbingan haji secara gratis bagi masyarakat yang mau dibimbing. Selain itu, PDHI juga mengadakan pengajian sepulang dari Mekkah. Tujuan pengajian ini untuk menjaga ilmu keagamaan agar tidak berubah keimanannya setelah berangkat haji.⁴⁹

Pada tahun 1956-1958 terjadi peningkatan pendaftaran calon haji. Pada tahun tersebut jumlah haji di Indonesia mengalami kenaikan begitu pula di wilayah D.I Yogyakarta. Antusiasme calon jama'ah haji sering kali lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun ini perekonomian di D.I Yogyakarta cenderung membaik meskipun tidak signifikan, hal ini juga berbarengan dalam sektor pendidikan dan juga infrastruktur.

⁴⁷ H. Djuanda, Wawancara di Jalan Perkapalan Alun-Alun Utara, Yogyakarta, 27 Agustus 2018.

⁴⁸ Tim sekretariat PDHI, *Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jl, Pekapalan ALun-Alun Utara, tt), hlm. 2.

⁴⁹ Wawancara Bapak H. Djuanda, *loc.cit*

Pada tahun 1958-1961 terjadi penurunan pendaftaran haji di D.I Yogyakarta, penurunan ini disebabkan salah satunya karena kenaikan ONH pemberangkatan haji. Kenaikan jumlah ONH ini salah satunya disebabkan pemerintah tidak punya cukup devisa, sehingga di tahun 1960 tidak lagi diberangkatkan haji dengan pesawat terbang dan calon-calon jama'ah haji hanya bisa pergi haji menggunakan kapal laut.⁵⁰

Penyelenggaraan urusan haji di D.I Yogyakarta tidak lepas dari penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia pada umumnya. Kebijakan haji di D.I Yogyakarta menganut pada kebijakan haji yang dibuat oleh pemerintah pusat. Surat Menteri Agama No. 397/H/SU/a/7907 tanggal 27 Juni 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji untuk musim haji tahun 1961 kepada semua kantor urusan agama di kabupaten bahwasannya pelaksanaan undian kuota berdasarkan prioritas yang mendaftarkan sejak 5 tahun sebelumnya lebih didahulukan, kemudian yang telah mendaftar sejak 2 tahun sebelumnya, kemudian yang telah mendaftar sejak satu tahun sebelumnya.⁵¹ Tahun 1962-1965 selalu mengalami peningkatan jumlah jama'ah haji di D.I Yogyakarta. Hal ini sehubungan dengan peraturan pemerintah pada tahun 1960 bahwasannya yang bisa berangkat haji ialah jama'ah yang telah mendaftar pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1964-1965 tidak terdapat data mengenai kotum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun berdasarkan data yang ada jumlah orang yang melakukan ibadah haji mengalami peningkatan.

c. Penyelenggaraan Urusan Haji di D.I Yogyakarta Pada Masa Orde Baru

Pada awal masa Orde Baru tahun 1966, urusan haji mulai diperhatikan oleh pemerintah. Intruksi Presiden No. 6/1969 organisasi penyelenggara perjalanan haji seluruhnya ditangani oleh pemerintah. Lembaga atau organisasi swasta tidak diperkenankan menyelenggarakan perjalanan haji.⁵² Tujuan pemerintah melaksanakan

⁵⁰ Kurnia Tsalitsatin, *op.cit.*, hlm. 77.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 53.

⁵² *Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No 2721, Berisi Tentang Laporan Penyelenggaraan Haji di DIY Tahun 1970/1971.*

kebijaksanaan seperti itu ialah untuk melindungi calon jama'ah haji agar tidak terlantar karena ditipu oleh orang-orang atau organisasi penyelenggaraan perjalanan haji yang tidak bertanggung jawab.⁵³

Pada tahun 1970-an pemerintah membentuk pengurus yang bernama Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan haji. Panitia tersebut yang mengurus dari pemberangkatan hingga pemulangan. Jama'ah haji yang berangkatnya menggunakan pesawat terbang maka untuk pemberangkatan ke Jakarta menggunakan transportasi pilihan seperti bis dan kereta api. Para calon jama'ah yang berada di daerah terlebih dahulu berkumpul di tempat departemen agama di daerah masing-masing, kemudian berkumpul di masjid Kauman Yogyakarta, kemudian baru ke embarkasi yang dituju.⁵⁴ Pada waktu itu asrama haji hanya ada di kota-kota embarkasi, Sesampainya di Jakarta jama'ah haji masuk ke asrama haji yang berada di Pondok Gede. Selama berada di asrama karantina mereka mendapatkan bimbingan haji terutama mengenai manasik haji dan pengetahuan tentang keadaan di Saudi Arabia. Bagi jama'ah haji di laut bimbingan haji dilanjutkan selama kapal menuju tanah suci.⁵⁵

Tabel II
Penyelenggaraan Haji di D.I Yogyakarta
tahun 1969-1974

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laut	Udara	JL
1969/1970	29	17	17	29	46
1970/1971			21	12	32
1972/1973	36	25	6	55	61
1973/1974	73	75	10	138	148
1974/1975	73	85	17	141	158
1975/1976	79	59	1	137	138

Sumber: Statistik Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 1981

Pada masa Orde Baru calon jama'ah haji di Yogyakarta selalu meningkat, hal ini

⁵³ Zamakhsyari Dhofier, *op.cit.*, hlm. 54.

⁵⁴ Wawancara Bapak H. Dardiri, *loc.cit.*

⁵⁵ Wawancara, Bapak Achmad Irfan, 11 Agustus 2018.

dikarenakan salah satu kebijakan mengenai kotum haji dari presiden bahwa kotum haji dan mereka yang mendapatkan kesempatan naik haji ditetapkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 1970-an calon jama'ah haji D.I Yogyakarta lebih dominan menggunakan pesawat terbang daripada menggunakan kapal laut. Pesawat lebih mendominasi karena biaya yang tidak jauh berbeda dengan kapal laut dan juga tidak membutuhkan perjalanan yang lama. Pemerintah telah meningkatkan sarana angkutan umum terutama fasilitas angkutan udara, baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia.⁵⁶ Meskipun demikian, masih ada jama'ah haji yang pergi beribadah haji menggunakan kapal laut. Beberapa alasan orang yang ingin menunaikan haji menggunakan kapal laut, seperti; Mendapat ketentraman dan ketenangan selama mereka di atas kapal sepanjang pelayaran, dengan menggunakan kapal mereka dapat beribadah lebih lama di tanah suci, mereka juga dapat membawa oleh-oleh lebih banyak daripada jama'ah haji udara yang batas minimum barang bawaan hanya 30 kg.⁵⁷

Pemberangkatan calon jama'ah haji periode 1974/1975 sepanjang sejarah penyelenggaraan Urusan Haji Indonesia merupakan yang paling tinggi jumlahnya, yaitu dengan jumlah 68.757 orang.⁵⁸ Hal ini juga terjadi di D.I Yogyakarta yang juga mengalami peningkatan jumlah jama'ah haji sebesar 141 orang. Besarnya ONH periode 1974/1975, yakni; ONH kapal laut sebanyak 556.000 (termasuk uang bekal kembali dan dana-dana lainnya untuk kepentingan umat Islam) dan ONH dengan kapal udara sebesar 560.000 (termasuk uang bekal kembali dan dana-dana lainnya untuk kepentingan umat Islam).⁵⁹ Berdasarkan surat edaran No. Ed/01/1974, alokasi angkutan laut pada akhir-akhir ini menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan para

⁵⁶ Zamakhsyari Dhofier, *op.cit.*, hlm. 52.

⁵⁷ Kurnia Tsalitsatin Robaniyah, *op.cit.*, hlm.79.

⁵⁸ A. Burhani, Tjokrohandoko, *Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1974/1975*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Urusan Haji, 1975), hlm. 9.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

calon haji mulai berminat mendaftarkan diri sebagai calon haji angkutan udara.⁶⁰

d. Pengaruh Ibadah Haji Bagi Masyarakat Sekitar

Ibadah haji merupakan salah satu bentuk ritual yang bergengsi dan hanya dikhususkan bagi umat Islam yang mampu, baik dalam segi finansial, maupun keagamaan. Misalnya, anggapan bahwa orang yang telah menunaikan ibadah haji akan mendapatkan kehormatan tersendiri di dalam masyarakat, dan menjadi bagian yang penting dalam masyarakat dan lebih mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Seringkali masyarakat mengandalkannya untuk memberikan ilmu yang telah didapatkannya sewaktu ibadah haji di Makkah dalam berbagai kegiatan, seperti mengisi kajian di masjid, mengajar ilmu agama bagi anak-anak di langgar-langgar atau di masjid, mendoakan orang sakit, dan lain sebagainya.⁶¹ Selain itu, mereka yang telah melaksanakan ibadah haji memiliki keilmuan dan diterapkan melalui kajian-kajian yang dilakukan dengan sukarela dan juga mereka melakukan bimbingan haji dengan gratis. Mereka yang bergabung dalam PDHI juga sering melakukan inisiatif pengumpulan dana yang nantinya akan disumbangkan kepada kaum duafa. Adapula mereka yang berinisiatif untuk mendirikan panti asuhan, pondok pesantren dll.⁶² PDHI sebagai lembaga sosial juga berperan terhadap nilai, moral dan berkakhlak yang mulia. Lembaga PDHI dapat terbentuk dari amal jariyyah yang dikumpulkan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PDHI diberbagai tempat di D.I Yogyakarta.⁶³

D. KESIMPULAN

Sejak tahun 1950 segala urusan haji diurus dan dilaksanakan oleh pemerintah

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 391.

⁶¹ Wawancara, Bapak Achmad Irfan, *loc.cit.*

⁶² Wawancara, Bapak Djuanda, *loc.cit.*

⁶³ Aris Risdiana, "Peran PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) dalam Mengembangkan Peradaban Masyarakat (Analisa Sumber Daya Manajemen)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 38.

Indonesia di bawah naungan kementerian agama. Jumlah jama'ah haji di Indonesia setiap tahunnya dibatasi oleh pemerintah. Pembatasan ini dilakukan karena keterbatasan alat transportasi dan ketetapan dari pemerintah Arab Saudi. Adanya pembatasan jumlah jama'ah haji di Indonesia tidak menutup kemungkinan jama'ah haji Indonesia tergolong besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Pada tahun 1960an urusan haji di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dalam kepengurusannya. Hal ini kemudian memunculkan yayasan-yayasan penyelenggaraan urusan haji dibawah kementerian agama. Yayasan-yayasan ini memunculkan pihak-pihak swasta yang ingin meraih keuntungan dalam pemberangkatan haji. Keseluruhan penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahun 1970an penyelenggaraan urusan haji mulai tertib dan tertata dari segi administrasi maupun yang lain.

Ketika urusan haji dipegang oleh kementerian agama masyarakat D.I Yogyakarta baru melaksanakan ibadah haji di tahun 1950an. Jumlah jama'ah haji di D.I Yogyakarta mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Peningkatan dan penurunan tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat dan juga kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah jamaah haji yang berangkat mengacu pada jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah meskipun banyak masyarakat yang ingin mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Masa pemerintahan Orde Baru jumlah jama'ah haji D.I Yogyakarta yang berangkat selalu stabil, sampai pada tahun 1974 jumlah jama'ah haji D.I Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan-peningkatan itu dikarenakan kondisi perekonomian yang semakin bagus dan fasilitas-fasilitas semakin memadai

Masyarakat memandang bahwa orang-orang yang telah melakukan ibadah haji mempunyai perekonomian yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, seringkali masyarakat mengandalkannya untuk memberikan ilmu yang telah didapatkannya sewaktu ibadah haji di Makkah dalam berbagai kegiatan, seperti mengisi kajian di masjid, mengajar ilmu agama bagi anak-anak di langgar atau di masjid, mendoakan orang sakit, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA**Arsip:**

ANRI, Ekuin (Ekonomi Keuangan dan Industri) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1969.

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum 2692. Berisi tentang Pembagian Kotum untuk Musim Haji Tahun 1962, Yogyakarta: BPAD DIY.

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum 2714. Berisi Laporan Penjelenggaraan Urusan Hadji Daerah Istimewah Jogjakarta Tahun 1970-1971, Yogyakarta: BPAD DIY.

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum 2721. Berisi Laporan Penjelenggaraan Urusan Hadji Daerah Istimewah Jogjakarta Tahun 1970-1971, Yogyakarta: BPAD DIY.

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku I Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 653. Berisi Laporan tentang Keadaan Desa-desa dari Kabupaten Sleman Tahun 1957, Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2002.

Arsip Jawatan Pemerintahan Umum No. 2705. Berisi Laporan Penjelenggaraan Urusan Hadji Daerah Istimewah Jogjakarta Tahun 1970-1971, Yogyakarta: BPAD DIY.

BPS Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957, *Laporan tentang Perkembangan Ibadah Haji dari DIY Tahun 1950-1961.*

Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji tahun 1974-1975, Jakarta: Direktorat Jenderal Urusan Haji.

Wawancara

Nama	Usia	Pekerjaan
H. Achmad Irfan	70	Kepala Seksi Urusan Haji di Kementerian Agama Provinsi D.I Yogyakarta
H. Hadjir	87	Dewan Pembina Haji

H. Dardiri	85	Kepala Seksi Pendidikan Agama di Departemen Agama Bantul
H. Drs. Djuanda	71	Ketua PDHI

BUKU

A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2015.

Atim Supomo, Djumarwan, dkk, *Brimob: Dulu, Kini, dan Esok*, Yogyakarta: Korps Brimob Polri, 2015.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Bening Tri Hanggoro, "Sejarah Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta 1960-1980", *Skripsi* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.

Deliar Noer, *Administrasi Islam Indonesia*, Jakarta: CV Sejahtera, 1983.

Djoko Soekirman dkk, *Sejarah Kota Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986.

Djoko Suryo, *Kota Lama Kota Baru (Sejarah Kota-Kota Di Indonesia)*, Yogyakarta: Ombak, 2005.

H. Mursyidi dan H. Sumuran Harahap, *Lintas Sejarah Perjalanan Haji Indonesia*, Jakarta: MARS, 1948.

Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Henri Chambert-Loir, *Naik Haji di Masa Silam Tahun 1900-1930*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995.

M. Alwi Dahlan, *Penduduk Indonesia Selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I: Daerah Istimewah Yogyakarta*, Jakarta:

- Indonesia, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1992.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Terj: Farid Wajidi dan Rika Iffati, Yogyakarta: Gading Publishing, 2012.
- Mona Lohanda, *Membaca Sumber Menulis Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Muhammad Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, Jakarta: CV Sejahtera, 2008.
- Mundzirin Yusuf, dkk (ed), *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pinus, 2006.
- Peta Departemen Agama D.I. Yogyakarta 1976, Jakarta: Departemen Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1976.
- Projodikoro, *Pengalaman dan Pengamalan Ibadah Haji*, Yogyakarta: tp. 1978.
- Sagimun Mulus Dumadi, *Sistem Kesatuan Hidup setempat Daerah Istimewah Yogyakarta*, Yogyakarta: Depdikbud, 1980.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Srie Sadaah Supono, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Tatakrma Daerah: Studi Kasus Pada Komuniti Perkotaan di Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud, 1989.
- T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengetahuan Awal*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Tim Penyusun, *Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY, 2014.
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah 2013.
- Tim sekretariat PDHI, *Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Jl, Pekapalan ALun-ALun Utara, tt.
- Tulus, *Membangun Citra Departemen Agama: melalui Penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Mediacita, 2005.
- Zamakhsyari Dhofier, *Dampak Ekonomi Ibadah Haji di Indonesia*, Prisma edisi April vol. XII.

Surat Kabar

Surat kabar *Nasional*, 1 Juli 1953.

BIODATA

Nama : Erwinda Faridatus. S

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Maret 1996

Riwayat Pendidikan : SDN Joto Sanur II
MTS Al-Rosyid
MAN 3 Jomban

Yogyakarta Oktober 2018

Pembimbing

Reviewer

Prof. Dr. Ajad Sudrajat, M.Ag
NIP. 19620321 198903 1 001

Dr. Miftahuddin M. Hum
NIP. 19740302 200312 1 006